

**HAMBATAN PENGELOLAAN USAHA KIOS MINYAK SOLAR PADA BUMDES MITRA
BAHARI DESA PANGKIL KECAMATAN TELUK BINTAN KABUPATEN BINTAN**

Shinta Santia¹, Nur Aslamaturrahmah Dwi Putri², Yudhanto Satyagraha Adiputra³
shintasantia@gmail.com

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji

ABSTRACT

According to the company's plan to increase its investment in the country by means of direct payment from the village's wealth to manage its assets and other businesses as an effort to improve living conditions, the apangkil village's largest to manage to the current level of land and ocean transport is between land and sea transport. A common phenomenon in much of the BUMDes after the formation was difficult to develop businesses, Aa was the case with the BUMDes Mitra Bahari village of Pangkil. The purpose of this research is to overcome any obstacles in the management of BUMDes Mitra Bahari Desa Pangkil Solar Oil Kiosk bussines Bintan Bay District Bintan Regency. In this study the author. using this type of Qualitative Descriptive research in this research informants a total of 7 people. Based on the results of the research, it can be concluded below Baerriers ti Business Management of BUMDes Solar Oil Stall Mitra Bahari Teluk Bintan District Bintan Regency is the non-availability of subsidy quota for the solar

keywords : Management, Obstacles, BUMDes.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UMRAH

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UMRAH

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UMRAH

I. Pendahuluan

Peran BUMDes adalah mengatur perekonomian yang ada di desa terutama bidang usaha bisnis penyewaan barang, usaha sosial sederhana, usaha jasa pelayanan, bisnis keuangan secara mikro, usaha bersama masyarakat. Badan Usaha Milik Desa Pangkil merupakan salah satu Badan Usaha Desa yang berada di Kecamatan Teluk Bintan. Berdasarkan peraturan desa Pangkil Nomor 4 Tahun 2015 tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didirikan pada tahun 2017 dimana Badan Usaha Milik Desa Pangkil ini bergerak dibidang usaha penyewaan alat transportasi laut dan darat seperti pompong dan kaisar. Badan Usaha Milik Desa Pangkil dibentuk melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan keputusan kepala Desa yang tumbuh dari bawah dan berdasarkan gotong royong dan kebersamaan.

Harapan pemerintah terkait pembentukan BUMDes nyatanya tidak sesuai dengan yang terjadi. Beberapa BUMDes yang sudah dibentuk di berbagai daerah tidak dapat berkembang secara optimal dan akhirnya tidak dikelola. Berdasarkan beberapa fenomena BUMDes di beberapa daerah yang tidak berjalan maksimal, maka penelitian ini bermaksud untuk mengidentifikasi kendala dalam pengelolaan BUMDes di Desa Pangkil yang mengakibatkan terhambatnya perkembangan BUMDes tersebut. Alasan pemilihan Desa Pangkil dikarenakan Desa Pangkil merupakan salah satu desa yang memanfaatkan dana desanya untuk mendirikan BUMDes, BUMDes milik Desa Kopeng ini dibentuk dengan cara musyawarah desa. Namun dari hasil wawancara awal dan dokumentasi awal ditemukan bahwa BUMDes milik desa Pangkil belum berjalan secara maksimal, BUMDes desa Pangkil belum maksimal. Menurut penuturan salah satu Kepala Dusun pada desa tersebut antusiasme warga yang tinggi terkait pendirian BUMDes hanya di awal saja, warga setempat lebih berfokus pada kegiatan nelayan yang sudah bertahun-tahun menjadi mata pencaharian mereka.

Dengan kehadiran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini diharapkan desa menjadi lebih mandiri dan masyarakatnya pun menjadi sejahtera. Tetapi mengingat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) masih termasuk hal yang baru keberadaannya, maka tidak heran didalam prakteknya masih ada beberapa kendala yang muncul terutama dalam segi pengelolaan dan Sumber Daya Manusia yang belum cukup memadai. Keterlibatan masyarakat dalam program BUMDes memiliki keterbatasan dalam mengembangkan usaha di Desa Pangkil sampai saat ini Badan Usaha Milik Desa hanya mempunyai tiga unit usaha yaitu transportasi laut, angkutan barang laut dan darat .

Berdasarkan observasi dilapangan ditemukan bahwasanya di Desa Pangkil, Badan Usaha Milik Desa belum cukup memadai yang mana Badan Usaha Milik Desa masih mengalami hambatan di dalam pemberdayaannya, yaitu usaha apa saja yang di urus oleh BUMDes, seperti usaha kios minyak solar yang saat ini masih terkendala namun hingga saat ini usaha tersebut masih berstatus aktif. Sehingga sampai saat ini usaha tersebut tidak dapat dijalankan sebagaimana yang telah direncanakan. Sehingga sampai saat ini BUMDes Desa Pangkil hanya bergerak dalam usaha penyewaan barang.

Tabel 1.1 Program BUMDes Mitra Bahari

No	Jeis Usaha	Berjalan	Tidak Berjalan	Jumlah
1	Transportasi Laut	✓		Pompong 2 unit
2	Angkutan Barang Laut	✓		Pompong 1 unit
3	Angkutan Barang Darat	✓		Kaisar 2 unit
4	Kios Minyak Solar		✓	1 Buah

Sumber : Wawancara awal bendahara BUMDes

Pada tahun 2017 BUMDes Mitra Bahari juga melakukan penganggaran untuk kegiatan operasional maupun kegiatan usahanya. Hal ini dimaksudkan untuk menunjang seluruh kegiatan BUMDes, sehingga seluruh kegiatan atau usaha yang dijalankan dapat berjalan dengan optimal.

Dana yang telah dianggarkan tersebut didapat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa APBDes untuk pelaksanaan kegiatan BUMDes. adapun jumlah anggaran dan omset usaha tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Pada tahun 2017 BUMDes Mitra Bahari juga melakukan penganggaran untuk kegiatan operasional maupun kegiatan usahanya. Hal ini dimaksudkan untuk menunjang seluruh kegiatan BUMDes, sehingga seluruh kegiatan atau usaha yang dijalankan dapat berjalan dengan optimal. Dana yang telah dianggarkan tersebut didapat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa APBDes untuk pelaksanaan kegiatan BUMDes. adapun jumlah anggaran dan omset usaha tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.2 Unit Usaha Transportasi Laut

Keterangan	Jumlah (Rp)
Modal awal	Rp. 110.000.00 (Hibah Desa)
Pendapatan bersih	Rp. 3.885.000.

Sumber: Wawancara awal bendahara BUMDes

Tabel 1.3 Angkutan Barang Laut

Keterangan	Jumlah (Rp)
Modal awal	Rp. 75.410.000.
Pendapatan bersih	Rp. 6.057.000.

Sumber: Wawancara awal bendahara BUMDes.

Tabel 1.4 Angkutan Barang Darat

Keterangan	Jumlah (Rp)
Modal awal	Rp. 73.590.000.
Pendapatan bersih	Rp. 2.444.000.

Sumber: Wawancara awal bendahara BUMDes

Berdasarkan wawancara dari Bendahara BUMDes, desa Pangkil memiliki BUMDes yang bernama Mitra Bahari yang berdiri pada tahun 2017, dan sumber dana di desa Pangkil di dapat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa APBDes Rp. 150.000.000 anggaran tersebut digunakan bertujuan untuk mengelola usaha tersebut. Untuk usaha angkutan barang laut BUMDes Mitra Bahari memiliki omset sekitar 6.057.000 pertahunnya, Sedangkan transportasi darat (kaisar) omset nya sangat kecil dikarenakan tergantung pencatatan tetapi pengeluarannya atau biaya perawatan kaisar cukup besar karna alat-alat kaisar tersebut sangat mahal.

II. Metode Penelitian

Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu metode yang lebih menekankan analisis proses dari proses berfikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antarfenomena yang diamati, dan senantiasa menggunakan logika ilmiah (Gunawan, 2014:80). Penelitian ini merupakan konsektual yang menjadikan manusia sebagai instrumen, dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif. Dasar penelitian adalah observasi mendalam yaitu metode pengumpulan data dengan terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data-data dan fakta-fakta baik melalui wawancara langsung ataupun melalui pengamatan terhadap kondisi-kondisi yang berhubungan dengan obyek penelitian. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan data dan fakta yang berkenan dengan masalah dan unit yang diteliti.

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang secara faktual (moleong,2012,132).Adapun narasumber yang akan peneliti jadikan informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No.	Informan	Jumlah
1.	Kepala Desa Pangkil	1 Orang
2.	Sekretaris Desa pangkil	1 Orang
3.	Ketua BUMDes	1 Orang
4.	Bendahara BUMDes	1 Orang
5.	Anggota BUMDes	1 Orang
6.	Masyarakat Desa Pangkil	2 Orang
	Jumlah	7 Orang

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2020

III. Hasil dan Pembahasan

Dari hasil penelitian yang penulis laksanakan dilokasi penelitian berupa hasil wawancara langsung dilapangan yang berkenaan dengan judul Hambtan Pengelolaan Usaha Minyak Solar BUMDes Mitra Bahari Dipulau Pangkil Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan menemukan beberapa kendala atau hambatan yaitu seperti unit usaha Kios Minyak Solar hingga saat ini masih belum berjalan dikarenakan kuota subsidi untuk minyak solar tidak tersedia.

BUMDes Mitra Bahari di Desa Pangkil ini masih sangat kurang, manfaat yang dirasakan masyarakat pun masih sangat rendah walaupun kenyataanya pemerintah mendirikan Badan Usaha yang berguna sebagai lembaga penggerak perekonomian masyarakat khususnya masyarakat Pulau Pangkil yang mempunyai sasaran yaitu terlayannya masyarakat desa dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif serta tersedianya beragam media usaha dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tetapi pada kenyataan dilapangan khususnya di desa Pangkil ini BUMDes belum dapat dijalankan seperti pada maksud pendirian serta tujuannya. Hal tersebut terjadi karena masih banyak kendala yang terjadi dalam lembaga tersebut seperti :Berikut wawancara penulis dengan narasumber, yaitu ketua BUMDes Mitra Bahari : Masih ada beberapa kendala yang kita hadapi dalam pengelolaan BUMDes ini ya sebenarnya, seperti kurangnya manfaat yang dirasakan oleh masyarakat itu sendiri, kenyataan di lapangan saat ini BUMDes sendiri belum maksimal berjalan kita jalankan seperti pada maksud saat didirikan dan tujuannya, itu terjadi ya karna adanya kendala-kendala tadi.

1. Hambatan Dalam Penglolaan BUMDes Mitra Bahari

A. SDM Yang Kurang Memadai

yaitu kurangnya SDM yang kita miliki, seperti kurangnya pelatihan-pelatihan dan pendampingan. Dari hasil wawancara penulis dengan narasumber diatas dapat disimpulkan bahwasanya: Kurangnya SDM yang dimiliki BUMDes Mitra Bahari menjadi salah satu kendala

dalam mensosialisasikan BUMDes tersebut, seperti kurangnya pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kualitas SDM dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan.

B. Tidak Tersedianya Kuota Subsidi

Tidak tersedianya kuota subsidi untuk minyak solar yang membuat salah satu unit usaha BUMDes tidak berjalan hingga saat ini namun status unit usaha tersebut masih aktif hingga saat ini.

C. Kurangnya Komunikasi

Sebagian besar masyarakat sebenarnya sudah mengetahui keberadaan BUMDes, hanya saja karena kurangnya komunikasi saat mensosialisasikan BUMDes ini membuat sebagian besar masyarakat desa Pangkil ini belum mengetahui secara detail apa itu BUMDes, dan kurangnya pemahaman tentang pengelolaan, aset, hasil, dan kegiatan dari BUMDes Desa Pangkil.

2. Strategi Dalam Menghadapi Hambatan BUMDes Mitra Bahari

Dalam pengelolaan BUMDes ini Pemerintah Desa mengalami beberapa kendala. Namun dengan adanya kendala tersebut Pemerintah Desa selalu menggunakan strategi-strategi untuk mengatasi hambatan tersebut.

Adapun strategi yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang di hadapi dalam mensosialisasikan BUMDes di Desa Pangkil, sebagai berikut :

- A. Strategi dalam mengatasi kendala tentang keterbatasannya tenaga kerja dan kurangnya SDM, terutama dalam bidang keuangan dan kewirausahaan di BUMDes sendiri yaitu, akan menambakan tenaga kerja yang baru dan professional, serta memastikan terlebih dahulu jika dengan penambahan karyawan baru tidak akan terhambat dalam sistem operasionalnya, sehingga kedepannya BUMDes Mendalo Mitra Bahari Didedesa Pangkil ini tetap akan berkembang dengan baik. Selain itu untuk memperbaiki kurangnya SDM yang ada dengan memberikan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat desa agar dalam pelaksanaan, dan mensosialisasikannya dapat berjalan dengan baik dan BUMDes sendiri dapat berkembang.
- B. Strategi dalam mengatasi kendala kurang yang komunikasi, kurangnya kepercayaan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya unit-unit usaha BUMDes ini, yaitu dengan memberikan pendampingan dan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat. Berikut wawancara penulis dengan narasumber, yaitu Sekertaris Desa Pangkil.

Tabel 4.4 Unit Usaha BUMDes Mitra Bahari

No	Unit usaha	Aktif/Tidak Aktif
1	Transfortasi Laut	Aktif
2	Angkutan Darat	Aktif
3	Angkutan Laut	Aktif
4	Kios Minyak Solar	Tidak Aktif

Sumber : Data Olahan Peneliti.

Tabel 4.4 diatas menjelaskan unit-unit usaha yang dikelola oleh BUMDes Mitra Bahari.Desa Pangkil adalah salah satu desa yang sudah mendirikan BUMDes hampir 4 tahun, unit usaha ini bersifat aktif dan satu unit usaha yang tidak aktif.

3. Analisis Perencanaan BUMDes Mitra Bahari

Perencanaan daalam BUMDes sangt dibutuhkan, karena tanpa perencanaan maka suatu organisasi tidak bisa berjalan dengan baik. Perencanaan yang telah dilakukan BUMDes Mitra Bahari di desa Pangkil sebagai dasar awal untuk mencapai tujuan-tujuan yang ingin dicapai dan apa yang harus diperbuat untuk mencapai tujuan tersebut. Kemampuan dalam melakikan ebuah perencanaan pada awalnya tidak terlepas dari pengetahuan Pengelola BUMDes itu sendiri tujuan dn

sasaran yang ingin dicapai, sebab perencanaan pada awal akan memberikan kontribusi sangat penting dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

4. Analisis Pengorganisasian BUMDes Mitra Bahari

Kepengurusan BUMDes Mitra Bahari sudah memiliki struktur organisasi dan sudah ada visi misi dan sudah ada SK kepengurusan. Pengurusan sudah memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Hanya saja tidak memiliki kantor khusus BUMDes. Terkait pengurus BUMDes dipilih masyarakat secara langsung.

5. Analisis Pengarahan BUMDes Desa Pangkil

Pengarahan berhubungan dengan memberikan arahan, motivasi, bimbingan, saran Perintah kepada bawahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi agar dapat dilakukan dengan baik dan benar dan sesuai sasaran.

6. Analisis Pengawasan BUMDes Mitra Bahari

Pengawasan sudah dilakukan oleh BPD, tokoh masyarakat seperti masyarakat juga ikut serta mengawasi berjalannya BUMDes Mitra Bahari pengawasan yang dilakukan sudah berjalan dengan baik, namun masih ada masalah seperti Kantor BUMDes yang belum ada dan pendapatan untuk desa masih kecil.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil akhir penelitian ini memberikan hasil bahwa kendala atau hambatan BUMDes serta kurang optimalnya pengelolaan di BUMDes Mitra Bahari dikarenakan oleh: (1) Terbatasnya sumber daya manusia dalam pengelolaan BUMDes Mitra Bahari, Sumber Daya Manusia yang ada memiliki pekerjaan lain diluar BUMDes sehingga program kerja tidak dapat dijalankan secara maksimal. dikarenakan masyarakat desa Pangkil umumnya adalah nelayan yang sudah menjadi mata pencariannya yang sudah bertahun-tahun. (2) kuota subsidi minyak solar yang dimana pengurus sudah menjalankan dan mengupayakan dengan semaksimal mungkin tetapi masih belum ada hasil.

1. Perencanaan

Dilihat dari tahap perencanaan didalam membua unit usaha BUMDes Mitra Bahari menyesuaikan dengan potensi yang dimiliki oleh desa dan lingkungan sekitar, memiliki tujuan yaitu untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa program yang dijalankan memberikan kontribusi kedesa.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian BUMDes sudah berjalan dengan baik, dapat dilihat dari adanya struktur organisasi BUMDes dan setiap pengurus sudah mengetahui tugas dan menjalankan serta bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya.

3. Pengarahan

Pengarahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengurus BUMDes Mitra Bahari telah mendapatkan bimbingan motivasi dan saran yang diberikan oleh Pemerintah Desa agar lebih giat bekerja dalam mengembangkan unit usaha yang telah dibentuk secara bersama-sama melalui musyawarah guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

4. Pengawasan

Pengawasan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengurus BUMDes Mitra Bahari telah mendapatkan bimbingan motivasi dan saran yang diberikan oleh Pemerintah Desa agar lebih giat

bekerja dalam mengembangkan unit usaha yang telah dibentuk secara bersama-sama melalui musyawarah guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dilihat dari strategi pemerintah desa pangkil dalam mengatasi kendala atau hambatan tersebut menyesuaikan dengan potensi yang dimiliki oleh desa dan lingkungan sekitar, untuk menghadapi hambatan atau kendala tersebut pemerintah desa pangkil.

V. Daftar Pustaka

Buku

Sutoro, E (2015). *Regulasi Baru, Ide, Misi dan Semangat Undang-Undang Desa*.

Kementrian Desa Pwmbangunan Daerh Tertiggal dan Transmigrasi.

Manullang.(2012). *Dasar-Dssar Manajemen*.Ghalia Indonesia.

Jurnal/Skripsi

- Ardiansyah, Darman (2015). ”Peran Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015”
- Wiwin (2017). “Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Di Desa Salassae Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.
- E Journal Ilmu Pemerintahah, volume 4, Nomor 4, 2016.1786-1796. (DiAkses 8 Oktober 2019 19:38 WIB Dwi Riwayati 2018, “Strategi BUMDes Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Teluk Sasah).
- Yulastri, dkk.,(2018). “Implementasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Rae KecamatanBeo Utara Kabupaten Kepulauan Talaud”.
- Meike Indri Farosa, Aprina Nugrahesthy Sulistya Hapsari.” Analisis Kendala Penglolaan BUMDes Kopeng Kabupaten Semarang.
- Ramadina, Baiq Tesya (2020) “ Analisis Pengelolaan Pada BUMDes Rahayu Desa Montong Gamang Lombok Tengah ”
- Adi Firmansyah (2018) “Efektivitas Dan Efesiensi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Keceamatan Tanete Kabupaten Barru”